

BAB I

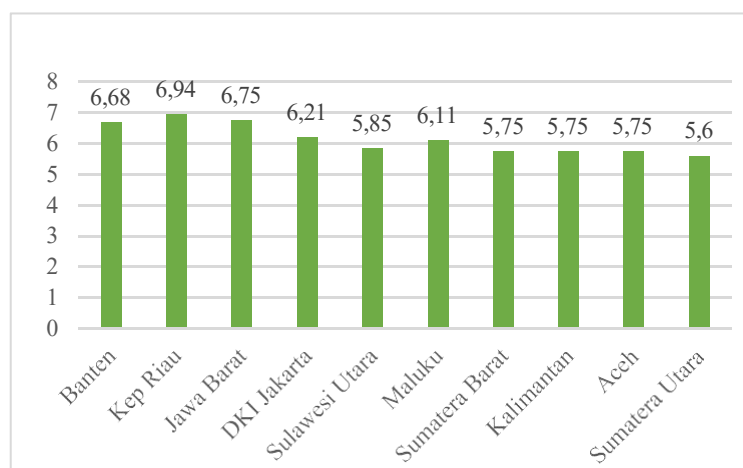
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangguran merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan dan stabilitas ekonomi suatu negara. Secara teoritis, pengangguran menggambarkan kondisi ketika individu yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, namun masih aktif mencari atau siap untuk bekerja *International Labour Organization* (ILO, 2023). Dalam pandangan makroekonomi, tingginya tingkat pengangguran mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan lapangan pekerjaan yang ada, yang menandakan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia dalam proses produksi nasional (Mankiw, 2021). Kondisi ini tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi, tetapi juga sosial, karena dapat memperlebar kesenjangan pendapatan, meningkatkan angka kemiskinan, serta menurunkan tingkat produktivitas masyarakat. Jika dibiarkan berlarut-larut, pengangguran dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kualitas hidup penduduk secara keseluruhan.

Secara fundamental, penelitian ini didasari oleh Grand Theory Ekonomi Makro, khususnya Teori Pasar Tenaga Kerja. Teori ini menjadi landasan utama untuk memahami bagaimana dinamika produksi dan struktur industri berinteraksi dengan ketersediaan lapangan kerja secara agregat. Didukung oleh Okun (1962) Hukum (Okun's Law) dalam Elhorst, J dkk (2021) yang menyatakan bahwa peningkatan output ekonomi biasanya diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran

Permasalahan krusial yang menjadi fokus penelitian ini terletak pada tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 10 provinsi terpilih yang notabene merupakan pusat akselerasi ekonomi dan industri nasional. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik tahun 2024, tingkat pengangguran di wilayah-wilayah strategis ini tercatat secara konsisten melampaui rata-rata nasional yang berada di rentang 4,82 hingga 4,91 persen. Kondisi ini mengindikasikan adanya konsentrasi masalah ketenagakerjaan justru di wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi. Berikut ini adalah grafik tingkat pengangguran terbuka di 10 provinsi pada tahun 2024:



Sumber: BPS Indonesia, 2024 (data diolah)

Gambar 1.1 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 (Persen)

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Gambar 1.1, data menunjukkan bahwa Kepulauan Riau menempati posisi tertinggi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 6,94 persen, disusul oleh Jawa Barat sebesar 6,75 persen dan Banten sebesar 6,68 persen. Angka ini cukup menarik, di mana provinsi-provinsi yang

menjadi basis industri manufaktur dan gerbang investasi nasional justru memiliki tingkat pengangguran yang jauh di atas rata-rata nasional (4,82 – 4,91 persen). Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan pengangguran di Indonesia tidak terjadi secara merata, melainkan terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu.

Tingginya tingkat pengangguran di provinsi-provinsi tersebut menjadi perhatian tersendiri mengingat wilayah-wilayah tersebut dikenal sebagai pusat kegiatan ekonomi, industri, dan investasi nasional. Secara konseptual, daerah dengan aktivitas ekonomi yang tinggi seharusnya memiliki kapasitas penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Namun, realitas menunjukkan bahwa pertumbuhan kegiatan ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan struktural dalam mekanisme pasar tenaga kerja di tingkat daerah.

Dalam konteks daerah dengan basis industri manufaktur seperti yang terlihat pada grafik penelitian (Banten dan Jawa Barat), TPT cenderung tinggi akibat adanya ketidakseimbangan antara supply tenaga kerja yang melimpah (migrasi) dengan demand dari industri yang semakin selektif dan otomatis (Todaro & Smith, 2015).

Dalam kajian ekonomi ketenagakerjaan, perbedaan tingkat pengangguran antarwilayah sering dikaitkan dengan ketidaksempurnaan pasar tenaga kerja, baik akibat ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja, perubahan struktur ekonomi, maupun rigiditas kebijakan ketenagakerjaan. Tingginya pengangguran

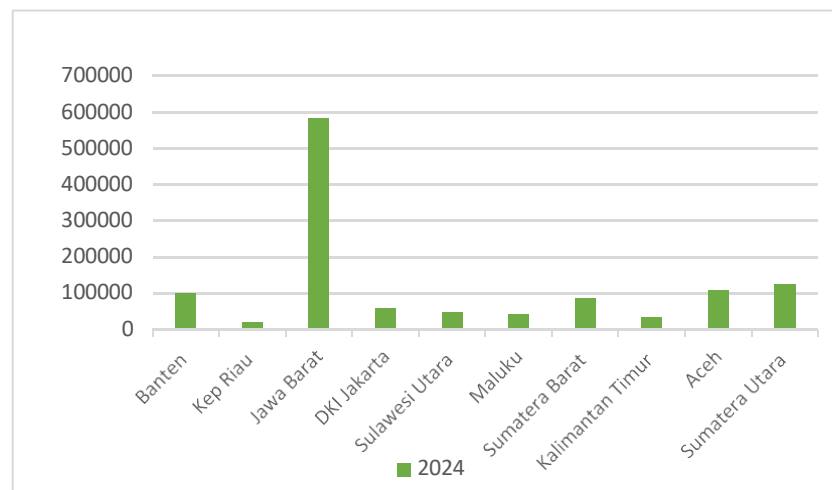
di wilayah dengan basis ekonomi kuat menunjukkan bahwa kebijakan yang bersifat nasional belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan spesifik yang terjadi di daerah-daerah dengan tekanan pengangguran tinggi. Dalam upaya menanggulangi permasalahan pengangguran, Pemerintah Indonesia telah merumuskan dan menerapkan berbagai kebijakan upaya strategis untuk mengatasi pengangguran melalui sinergi kebijakan fiskal dan program ketenagakerjaan. Studi Mahda Vikia et al. (2023) menunjukkan bahwa instrumen perpajakan dan belanja negara terbukti efektif dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Upaya ini diperkuat dengan program Kartu Prakerja dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang berperan penting dalam meningkatkan kompetensi kerja pasca-pandemi (Suparta, 2024). Selain itu, pemerintah juga fokus pada pelatihan vokasi untuk mengurangi ketidaksesuaian keahlian (*skill mismatch*) antara tenaga kerja dan kebutuhan industri (Nabila, 2024). Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti akses yang belum merata dan kurikulum pelatihan yang kurang relevan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan jangka panjang yang lebih terpadu, meliputi aspek fiskal, pendidikan, dan regulasi ketenagakerjaan (Suryono et al., 2020).

Industri mikro dan kecil (IMK) memiliki peran krusial dalam penyerapan tenaga kerja karena sifatnya yang padat karya (*labor-intensive*), dimana teori ekonomi pembangunan menyatakan bahwa UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah pilar penting dalam menciptakan lapangan kerja lokal, terutama di wilayah dengan keterbatasan modal besar dan investasi asing yang

terbatas. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia mampu menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional, atau sekitar 117 juta pekerja, yang mencerminkan kontribusi masif sektor ini dalam mengatasi masalah pengangguran dan mendukung stabilitas sosial ekonomi masyarakat (Revo, 2024).

Peningkatan jumlah perusahaan IMK diharapkan dapat menurunkan TPT secara langsung karena membuka lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan distribusi pendapatan, dan memperkuat ekonomi lokal melalui *multiplier effect* yang dihasilkan dari aktivitas usaha mikro dan kecil yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Data dari Kementerian Investasi/BKPM (2024) menunjukkan bahwa pada semester I-2024, terdapat 2,4 juta proyek UMKM dengan total investasi Rp127 triliun yang berhasil menyerap 4,7 juta tenaga kerja, menunjukkan peran strategis sektor ini dalam penciptaan lapangan kerja baru. Berikut ini adalah grafik jumlah industri mikro kecil pada tahun 2024:



Sumber: BPS Indonesia Tahun, 2024 (data diolah)

Gambar 1.2 Jumlah Perusahaan Industri Mikro kecil tahun 2024 (Unit)

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan adanya perbedaan yang cukup

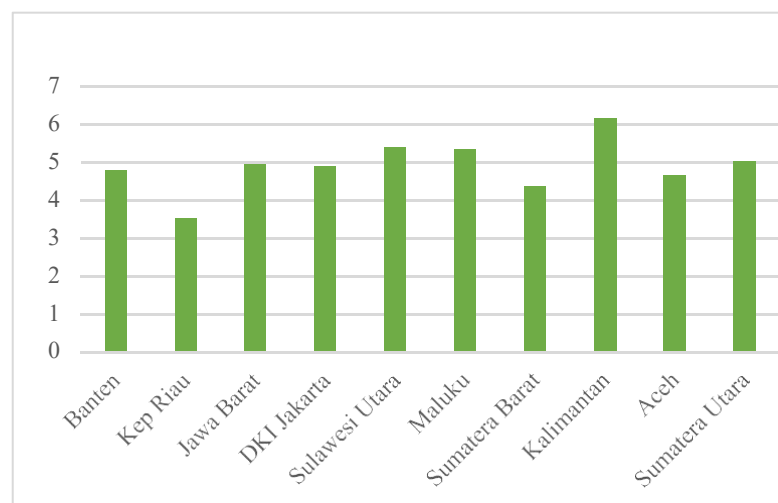
signifikan dalam jumlah unit Industri Mikro dan Kecil (IMK) antarprovinsi. Jawa Barat memiliki jumlah IMK yang sangat dominan, mendekati enam ratus ribu unit usaha, sementara beberapa provinsi lain seperti Maluku dan Sulawesi Utara menunjukkan jumlah yang relatif jauh lebih kecil. Secara empiris, fenomena tingginya pengangguran di provinsi seperti Banten dan Jawa Barat meskipun memiliki jumlah industri yang banyak, menunjukkan adanya *mismatch* (ketidaksesuaian) kualifikasi tenaga kerja. Sebaliknya, rendahnya pertumbuhan industri di wilayah timur Indonesia menjadi alasan empiris mengapa pengangguran sulit ditekan karena terbatasnya alternatif lapangan kerja di luar sektor informal.

Perbedaan ini mencerminkan ketimpangan kapasitas ekonomi daerah serta perbedaan tingkat pengembangan sektor usaha kecil. Secara teoritis, industri mikro dan kecil memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja karena sifatnya yang relatif padat karya. Namun demikian, permasalahan muncul ketika provinsi dengan jumlah IMK yang besar tetap mencatat tingkat pengangguran yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyaknya unit usaha tidak secara otomatis menjamin peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, di wilayah dengan jumlah IMK yang terbatas, rendahnya peluang kerja menjadi salah satu penyebab utama tingginya pengangguran.

Menurut teori kewirausahaan Schumpeter, UMKM merupakan motor penting dalam penciptaan lapangan kerja melalui aktivitas ekonomi yang berbasis inovasi dan inisiatif masyarakat. Akan tetapi, efektivitas sektor ini sangat dipengaruhi oleh skala usaha, produktivitas, dan keberlanjutan bisnis. Ketika IMK

didominasi oleh usaha berskala sangat kecil dengan produktivitas rendah, kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja menjadi terbatas.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu variabel kunci dalam teori makroekonomi karena berhubungan langsung dengan peningkatan kapasitas produksi dan penciptaan kesempatan kerja. Mengacu pada Hukum Okun, peningkatan PDRB biasanya diikuti dengan bertambahnya kebutuhan tenaga kerja akibat naiknya permintaan dari konsumen maupun investor sehingga perusahaan



terdorong memperluas produksinya (Nabila, 2024).

Oleh sebab itu, penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata melalui penciptaan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan. Berikut ini adalah grafik laju pertumbuhan ekonomi di 10 provinsi pada tahun 2024:

Sumber: BPS Indonesia Tahun, 2024 (data diolah)

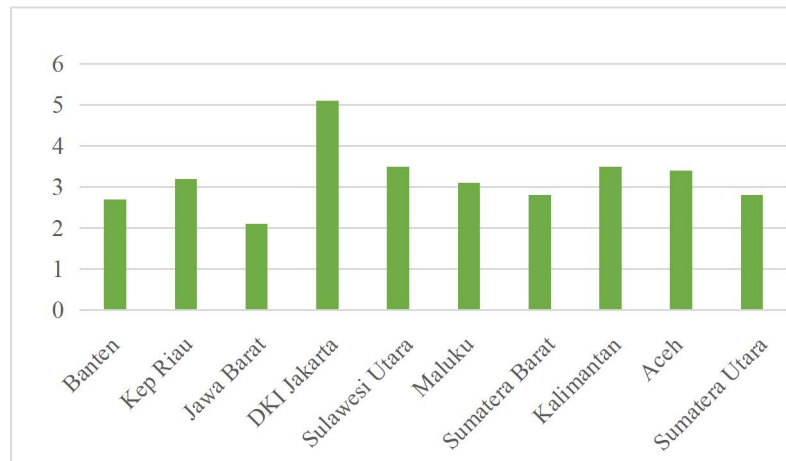
Gambar 1.3 Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2024 (persen)

Berdasarkan gambar 1.3 menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada sepuluh provinsi tahun 2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Meskipun beberapa provinsi mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, kondisi tersebut tidak selalu disertai dengan penurunan tingkat pengangguran yang sebanding. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja.

Namun dalam praktiknya, terdapat fenomena *jobless growth*, yaitu kondisi ketika perekonomian tumbuh tetapi tidak diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini umumnya terjadi jika investasi lebih banyak diarahkan ke sektor padat modal, seperti pertambangan atau industri teknologi tinggi, yang relatif minim membutuhkan tenaga kerja (Suparta, 2024). Penelitian Azzahra et al. (2024) menemukan bahwa pengangguran berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat periode 2002–2023, sehingga menegaskan adanya hubungan timbal balik antara kedua variabel tersebut dalam konteks pembangunan daerah.

Kenaikan upah minimum pada dasarnya membawa dua konsekuensi bagi efisiensi tenaga kerja. Di satu sisi, peningkatan upah dapat memperbaiki kesejahteraan pekerja dan memperkuat daya beli masyarakat, sehingga konsumsi

rumah tangga terdorong dan aktivitas ekonomi dapat tumbuh. Berikut ini adalah grafik upah minimum provinsi pada tahun 2024:



Sumber: BPS Indonesia Tahun, 2024 (data diolah)

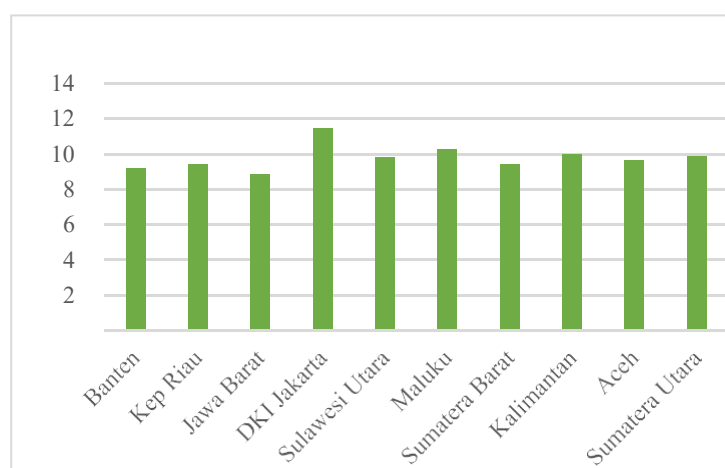
Gambar 1.4 Upah minimum provinsi tahun 2024 (juta rupiah)

Berdasarkan Gambar 1.4 pola kenaikan ini menunjukkan di seluruh wilayah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan DKI Jakarta dan Sulawesi Utara mencatat tingkat UMP yang relatif lebih tinggi. Kebijakan upah minimum bertujuan untuk melindungi kesejahteraan pekerja, namun kebijakan ini juga memiliki implikasi terhadap keputusan perusahaan dalam mempekerjakan tenaga kerja. Tingginya UMP berpotensi meningkatkan biaya produksi, terutama bagi industri mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan modal. Kondisi ini dapat mendorong pelaku usaha untuk menunda perekrutan tenaga kerja baru atau membatasi ekspansi usaha. Akibatnya, kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dapat berhadapan dengan risiko meningkatnya pengangguran terbuka.

Dalam teori ekonomi ketenagakerjaan, terdapat perbedaan pandangan mengenai dampak upah minimum. Teori pasar tenaga kerja menyatakan bahwa

upah yang ditetapkan di atas tingkat keseimbangan dapat menurunkan permintaan tenaga kerja, sementara teori upah efisiensi menekankan bahwa upah yang lebih tinggi dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa dampak UMP terhadap pengangguran sangat bergantung pada kondisi ekonomi daerah.

Menurut teori modal manusia Gary Becker dalam Matache,I. (2023), pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja karena membekali individu dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk bersaing di pasar kerja. Namun, tingkat pendidikan tinggi tidak selalu menjamin kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi yang dimiliki. Di Indonesia, ketidaksesuaian ini masih sering terjadi, terlihat dari data BPS (2024) yang menunjukkan sekitar 35% pekerja muda bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka. Berikut ini adalah grafik rata rata lama sekolah di 10 provinsi pada tahun 2024:



Sumber: BPS Indonesia Tahun, 2024 (data diolah)

Gambar 1.5 Rata-rata lama sekolah menurut 10 provinsi di indonesia tahun 2024 (Tahun)

Berdasarkan Gambar 1.5 terlihat bahwa sepuluh provinsi dengan RLS tertinggi pada tahun 2024 adanya peningkatan rata-rata lama sekolah di seluruh provinsi, khususnya di wilayah dengan akses pendidikan yang lebih baik seperti DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan pembangunan di bidang pendidikan serta meningkatnya kualitas sumber daya manusia secara formal.

Namun demikian, peningkatan tingkat pendidikan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja. Di beberapa provinsi, tingkat pengangguran tetap tinggi meskipun capaian pendidikan relatif baik. Kondisi ini mengindikasikan adanya pengangguran terdidik yang berkaitan dengan ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa hubungan antara RLS dan gradien bersifat kompleks dan tidak linier. RLS yang tinggi memang berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, namun dampaknya terhadap pengangguran sangat bergantung pada kompetensi antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri, struktur ekonomi wilayah, serta kapasitas penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak hanya perlu meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi strategis yang mampu menyerap tenaga kerja terdidik secara optimal.

Menurut Al Mustakim dkk (2022) menemukan bahwa rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kota Kendari pada periode 2010–2021. Artinya, semakin tinggi rata-rata lama sekolah

penduduk, maka semakin rendah tingkat pengangguran yang terjadi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan berperan dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan angkatan kerja sehingga mereka lebih mudah terserap di pasar kerja. Di sisi lain, penelitian Manik dkk. (2025) menunjukkan bahwa meskipun rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan, fenomena tingginya pengangguran justru menimbulkan kontradiksi yang menghambat pemanfaatan bonus demografi. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendidikan dan kebutuhan dunia industri menjadi faktor penting untuk menekan angka pengangguran.

Meskipun banyak penelitian sebelumnya yang membahas keterkaitan antara laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi (UMP), tingkat pendidikan, dan tingkat pengangguran terbuka, namun sebagian besar penelitian hanya berfokus yang umumnya hanya mengandalkan variabel makro skala besar tanpa mempertimbangkan sektor Industri Mikro Kecil (IMK) yang memainkan peran strategis dalam mendorong aktivitas ekonomi lokal, menciptakan kesempatan kerja, serta memperkuat struktur perekonomian daerah melalui kontribusi pada sektor produksi dan distribusi. Sebagian besar penelitian juga bersifat nasional, sehingga gagal menangkap disparitas yang terjadi di tingkat provinsi dengan karakteristik pengangguran yang ekstrem. Penelitian ini untuk mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan sektor IMK dalam analisis di 10 provinsi terdampak pengangguran tertinggi.

Berdasarkan fenomena uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat

Pengangguran Terbuka di 10 Provinsi di Indonesia yang memiliki angka pengangguran tertinggi sehingga diharapkan bisa digunakan untuk mengurangi tingkat pengangguran di 10 Provinsi di beberapa provinsi yang paling terdampak. Peneliti mengambil judul penelitian "Analisis Pengangguran Terbuka di 10 Provinsi di Indonesia".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Industri Mikro kecil, Laju Pertumbuhan Ekonomi, UMP, Tingkat pendidikan secara parsial terhadap Tingkat pengangguran Terbuka di 10 Provinsi di Indonesia tahun 2010-2024?
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Industri Mikro kecil, Laju Pertumbuhan ekonomi, UMP, dan Tingkat Pendidikan secara bersama-sama terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 10 Provinsi di Indonesia tahun 2010-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Industri Mikro kecil, Laju Pertumbuhan ekonomi, UMP, dan Tingkat Pendidikan secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 10 Provinsi di Indonesia tahun 2010-2024
2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Industri Mikro kecil, Laju

Pertumbuhan ekonomi, UMP, dan Tingkat Pendidikan secara bersama-sama terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2010-2024

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Kegunaan pengembangan ilmu pengetahuan dalam penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi peneliti, tetapi juga bagi pembaca yang memerlukan pemahaman lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengangguran. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada masuknya variabel jumlah industri mikro kecil (IMK) ke dalam model analisis bersama pertumbuhan ekonomi, UMP, dan tingkat pendidikan.

Variabel IMK jarang digunakan dalam penelitian sebelumnya, padahal sektor ini memiliki peranan penting sebagai penyerap tenaga kerja. Dengan memasukkan IMK sebagai variabel utama, penelitian ini memberikan sudut pandang baru dalam kajian ketenagakerjaan dan diharapkan dapat menjadi rujukan empiris yang lebih relevan untuk pengembangan teori serta penyusunan kebijakan ekonomi daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis, menambah wawasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi pengangguran dan memenuhi syarat penyusunan tugas akhir
2. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan yang lebih efektif
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi referensi akademik

dan dasar perbandingan bagi penelitian selanjutnya

4. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai faktor-faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di daerahnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam melakukan kegiatan penelitian ilmiah, penulis terlebih dahulu menentukan lokasi penelitian, penelitian ini menganalisis 10 provinsi Indonesia yang memiliki permasalahan yang serupa dengan angka pengangguran tertinggi yaitu Provinsi Banten, Jawa barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Aceh, dan Sumatera Utara.

Pemilihan 10 provinsi tersebut ditentukan melalui metode purposive sampling dengan mempertimbangkan keterwakilan karakteristik wilayah yang heterogen di Indonesia dan didasarkan pada pertimbangan variasi kondisi Jumlah Industri Mikro kecil, pertumbuhan ekonomi, UMP, Tingkat pendidikan terhadap Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Melalui pengambilan data sekunder dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai sejak keluarnya surat keputusan pada bulan September 2025, yang diawali dengan pengajuan judul. Adapun pelaksanaan penelitian ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara interaktif oleh penulis dan pembimbing, pengumpulan data.

No	Kegiatan	2025	2026
----	----------	------	------

